

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian masih merupakan sektor andalan perekonomian nasional. Ketangguhan sektor pertanian termasuk sub sektor peternakan ditunjukkan oleh masih besarnya potensi sumber daya lokal, baik ternak, teknologi, kelembagaan maupun potensi lainnya, sehingga apabila potensi ini dapat dikembangkan dengan optimal diharapkan akan mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Mukson dkk, 2005).

Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah (kabupaten/kota) sebagai pelaksana pembangunan di wilayahnya. Provinsi melakukan koordinasi berbagai kegiatan pembangunan lintas kabupaten/kota. Sedangkan pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan, penyusunan standar, kriteria, norma, prosedur, bimbingan serta evaluasi pada aspek kebijakan teknis maupun fungsional.

Seiring dengan adanya perubahan tersebut, Departemen Pertanian sejak tahun 2001 telah merubah paradigma pembangunan sub sektor peternakan dari *provider* (pemberi) menjadi *enabler* (pemampu) dengan bertindak sebagai fasilitator, akserelator, dan regulator. Melalui peran baru ini maka pembangunan peternakan diarahkan untuk menumbuhkan pemberdayaan masyarakat sehingga

terjadi suatu kondisi yang memungkinkan berkembangnya proses berfikir dan bertindak kreatif pada kelompok sasaran pembangunan. Hal itu antara lain diindikasikan dengan tumbuh dan berkembangnya kelompok tani ternak mandiri serta terwujudnya peran institusi dalam memberikan pelayanan (Nugroho dkk, 2012).

Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi (Sukirno, Sadono, 2004). Namun pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, akan tetapi lebih dari itu pembangunan mempunyai perspektif yang lebih luas. Dimensi sosial yang sering diabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat yang strategis dalam pembangunan (Sukanto, 2010).

Sub sektor peternakan yang merupakan sektor pertanian masih merupakan sektor strategis dalam menopang perekonomian regional maupun nasional. Di Jawa Timur pada tahun 2016 kontribusi sub sektor peternakan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan sebesar Rp 31 246,1 miliar sedangkan berdasarkan harga berlaku sebesar 2,32% (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2016). Kondisi ini menunjukkan bahwa sub sektor peternakan mempunyai peranan yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga kedepan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar peran yang ada semakin nyata dalam kehidupan masyarakat.

Arifin (2004), mengemukakan bahwa agribisnis berbasis peternakan adalah salah satu fenomena yang tumbuh pesat ketika basis lahan menjadi terbatas. Tuntutan sistem usaha tani terpadupun menjadi semakin rasional seiring dengan tuntutan efisiensi dan efektifitas penggunaan lahan. Sub sektor peternakan sebagai salah satu sub sektor pertanian berperan dalam memenuhi kebutuhan gizi protein masyarakat dan salah satu sumber protein.

Menghadapi era persaingan global, pembangunan peternakan harus mampu mewujudkan peternakan yang maju, efisien dan tangguh. Peternakan tangguh merupakan kondisi dimana sumber daya yang ada (modal, alam, tenaga kerja, dan teknologi) dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi permintaan pasar baik secara regional, nasional, maupun global (Soehardji, 1990).

Permasalahan umum yang dihadapi sub sektor peternakan adalah menurunnya populasi ternak. Secara umum penyebab penurunan populasi ini adalah akibat dari kurang berkembangnya teknologi peternakan, dampak pembangunan, misalnya semakin kurangnya lahan penggembalaan, disamping faktor sosial budaya masyarakat (Rusastra, 1984).

Pembahasan ini bermaksud untuk memberi gambaran umum mengenai potensi ekonomi usaha ternak di Jawa Timur termasuk Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Disamping itu akan dicoba mengungkapkan kajian problematik dan prospek dalam pengusahaan dan pengembangannya. Permasalahan sosial ekonomi masih perlu disoroti lebih tajam, sehingga pengembangan dan pengalihan teknologi dapat berlangsung secara tepat, tanpa

menimbulkan akses negatif. Dengan fokus pada aspek sosial ekonomi diharapkan terbitnya sistem pembangunan peternakan secara terpadu.

Pengembangan sub sektor peternakan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan dengan mendekatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

Oleh karena itu, perlu analisis tentang potensi sub sektor peternakan di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan pendekatan teori basis ekonomi dan teori pertumbuhan wilayah agar dapat digunakan sebagai bahan perencanaan terhadap perekonomian di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan.

Sebagai wilayah yang berdampingan, Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan dapat bersinergi untuk mengoptimalkan potensi dari masing-masing wilayahnya. Penduduk Kabupaten Sumenep dan penduduk Kabupaten Pamekasan melakukan transaksi perdagangan ternaknya di tempat yang sama yaitu di Pasar Keppo Kabupaten Pamekasan yang terletak di sebelah timur tepatnya perbatasan Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya pasar tradisional tersebut menjadikan adanya sinergisitas antara kedua daerah tersebut.

Berdasarkan dari permasalahan dan adanya penurunan kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB serta kesadaran akan pentingnya sub sektor peternakan terutama sebagai penghasil pangan hewani, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS POTENSI SUB SEKTOR PETERNAKAN DENGAN PENDEKATAN *LOCATION QUOTIENT* (LQ) DAN *SHIFT SHARE* DI KABUPATEN SUMENEP DAN KABUPATEN PAMEKASAN”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada sub sektor peternakan di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan yang menjadi sub sektor basis atau sub sektor non basis?
2. Apakah ada sub sektor peternakan di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan yang menjadi sub sektor yang mendorong atau menghambat pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten tersebut?
3. Apakah ada sub sektor peternakan di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan yang menjadi sub sektor yang pertumbuhannya relatif cepat ataupun tumbuh relatif lambat di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah ada sub sektor peternakan di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan yang mempunyai ataupun tidak mempunyai keuntungan lokasional di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kontribusi sub sektor peternakan terhadap perekonomian di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk menganalisis peranan sub sektor peternakan terhadap perekonomian di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan
3. Untuk menganalisis pertumbuhan sub sektor peternakan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan
4. Untuk mengetahui keuntungan lokasional sub sektor peternakan Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan referensi kajian peranan subsektor peternakan dalam perekonomian daerah khususnya Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan
2. Sebagai kontribusi untuk menambah khasanah ilmu, khususnya untuk perbendaharaan literatur bagi perusahaan di UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan sebagai referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Pamekasan khususnya Dinas Peternakan untuk bahan acuan pengambil keputusan atau kebijakan dalam upaya pembangunan sub sektor peternakan.